

**ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBELAAN  
TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER  
EXCESS*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN**

**(Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)**

***SKRIPSI***

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

**Agus Sidid**

**(122211017)**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, faxsimili (024) 7601291, Website: [www.fs.walisongo.ac.id](http://www.fs.walisongo.ac.id)

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 ( empat ) eks.

Hal : **Naskah Skripsi**

**A.n. Sdr. Agus Sidid**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Agus Sidid**

NIM : **122211017**

Jurusan : **Hukum Pidana Islam**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)**

Dengan ini kami memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 01 Juli 2019

**PEMBIMBING**

  
**Dr.H.Ali Imron, M.Ag**

**NIP. 19730730 200312 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AGUS SIDID  
NIM : 122211017  
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA  
YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Analisis  
Putusan No. 09/Pid.B/2013/PTR)

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup,  
pada tanggal : Selasa, 30 Juli 2019

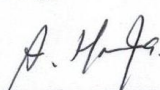
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik  
2018/2019.


Semarang, 30 Juli 2019

Dosen Penguji

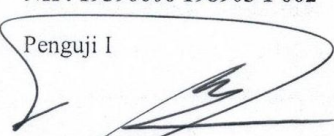
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


  
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
NIP. 19590606 198903 1 002

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 19730730 200312 1 003


Penguji I

  
Moh. Khasan, M.Ag  
NIP. 19741212 200312 1 004

Penguji II

  
Maria Anna Muryani, S.H., M.H  
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 19730730 200312 1 003

## ABSTRAK

*Noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam kitab undang-undang hukum pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

1. *Tindak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
2. *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*<sup>1</sup>

Terdapat kasus di Pekanbaru Pembelaan diri Ratna Dewi (35) dari Pemerkosaan yang berujung ditetapkannya dia menjadi tersangka, Begini Kronologisnya Kehormatan Ratna Dewi (35) nyaris melayang karena Perbuatan Adi Charli Siregar Alias Ipan Siregar (18). Beruntung dia bisa membela diri. Namun upaya RD membela diri malah dipandang lain oleh Kepolisian Pekanbaru Kota. Dia malah ditetapkan sebagai Tersangka. Sebab upaya membela diri yang dilakukan malah menyebabkan nyawa ACS Alias IS melayang.

Berdasarkan uraian tersebut maka perbincangan mengenai masalah tersebut masih dipandang sangat penting dan aktual. dalam hal ini penulis akan menjelaskan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam agar pasal tersebut tetap berfungsi, karena sulit dalam pembuktiannya. Sehingga tidak terjadi kasus seperti halnya di Pekanbaru tersebut terutama dalam tindak pidana pemerkosaan. Persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam.

Adapun kesimpulan penelitian mengenai Studi analisis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam perkara tindak pidana pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR) Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu tindakan terdakwa digolongkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dan memenuhi unsur-unsur *Noodweer Excess* sehingga menurut penulis terdakwa harusnya terbebas dari hukuman yang dijatuhkan.

---

<sup>1</sup> Pasal 49 KUHP

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dan skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penyusun.

Semarang, 01 Juli 2019

Deklarator



Agus Sidid  
122211017

## **MOTTO**

*“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian” (Buya Hamka).*

## **PERSEMBAHAN**

### **SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN**

- Kepada Orang tua saya Bapak Supari dan Ibu Siti Muadah yang setiap waktu selalu mendo'akanku dan selalu menunjukkan kebenaran kepadaku atas segala jerih payah dan pengorbanannya serta kasih sayang.
- Bapak dan ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun, dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran.
- Kakak-kakakku, Fahrur rozi, Zaenal Arifin serta Alm.adikku Nur wahidhin yang selalu menghiburku dan membuatku sadar akan sebuah cita-cita yang besar.
- Keluarga besar pengasuh PP Roudhotul Muchtajin yang terhormat Bapak Kyai Jazuli dan para Alumni.
- Ustadz-ustadzahku sewaktu kecil yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, bapak kyai Misrom, kyai H.Slamet, Kyai Whodho dan ustadzah Zamronah.
- UKM Resimen Mahasiswa(MENWA) yang sudah ijin kan saya bertempat tinggal dan menggali ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa.
- Yudha 36, Tohar, Nafis, Alfian, Takim, Imam, Farisa, Ella, Elly, Maya, Mella, Romdhonah terimakasih sudah mengajarkan Arti kebersamaan di saat suka maupun duka dalam membentuk jiwa yang 'korsa'.
- Sahabat sekaligus saudara Saya, Farid, Khomsin, Latifa Nur aini, Imam hadi, hilmi ilham, Suci Diyah s, Nur inayah dan Hani Uzikawati yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan, terimakasih untuk kebersamaannya dalam keadaan senang susah dan perjuangan yang kita lewati bersama.
- Keluarga besar TK Permata Hati dan Mushola Hidayatullah yang sudah ijin kan saya bertempat tinggal.
- Dan untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam selalu tercurah kehadiran Baginda Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membawa manusia pada perubahan dari jaman jahiliyah menuju jaman yang beradab yang penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Arief Junaedi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Rokhmadi.M.Ag.,selaku ketua jurusan ( Kajur ) Siyasah Jinayah dan bapak Rustam D.K.A.H.,selaku sekretaris jurusan ( sekjur ) Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
3. Bapak H.Dr.Ali imron ,M.Ag.,selaku pembimbing  
Yang dengan ikhlas Slalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan skripsi ini serta selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak serta Ibu Dosen tercinta yang sudah mengasihi dan mendidik serta mengajarkan kepada penyusun, tentang arti kehidupan yang sebenarnya agar menjadi orang yang tangguh dan bijaksana serta berakhlaq mulia dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
5. Semua staff pegawai Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
6. Teman-teman SJB Angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saling memberi motivasi satu dengan yang lain.



Atas semua kebaikannya penyusun hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Semarang, 01 Juli 2019

Penulis

Agus Sidid

NIM. 122211017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metodologi Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sumber Penelitian.....	7
a. Data Primer.....	7
b. Data Sekunder.....	7
3. Analisis Data.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess)</b>	
<b>dalam Perkara Pidana Pemerkosaan .....</b>	<b>10</b>
A. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess) dalam Hukum Positif.....	10
B. Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas (Noodweer Excess) dalam Hukum Pidana Islam.....	19
C. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	32

<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU Nomor 09/Pid.B/2013/PT .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU Nomor 09/Pid.B/2013/PTR .....</b>	<b>49</b>
A. ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU Nomor 09/Pid.B/2013/PTR .....	49
B. ANALISIS HUKUM ISLAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU Nomor 09/Pid.B/2013/PTR .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran Saran.....	56
C. Penutup.....	57

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Latar belakang masalah ini adalah *Noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam kitab undang-undang hukum pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- a) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
- b) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*<sup>1</sup>

#### **Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo :**

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 49 KUHP

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65)

R. Soesilo, memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas pembelaan yang diperbolehkan dan juga sanksi bagi pelaku pembelaan jika melampaui batas pembelaan. Hanya berdasarkan firman Allah SWT.

QS AL BAQARAH AYAT 194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

*Artinya : " Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."*<sup>3</sup>

Dari ayat tersebut hanya menerangkan tentang pengancuran menyerang balik ketika diserang tetapi tidak menjelaskan syarat dan sanksi bagi penyerang jika melebihi batas serangan. Begitu juga dalam pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan dalam melakukan suatu pembelaan.

---

<sup>3</sup> QS Al Baqarah Ayat 194

Terdapat kasus di Pekanbaru Pembelaan diri Ratna Dewi (35) dari upaya Pemerkosaan yang berujung ditetapkannya dia menjadi tersangka, Begini Kronologisnya Kehormatan Ratna Dewi (35) nyaris melayang karena Perbuatan Adi Charli Siregar Alias Ipan Siregar (18). Beruntung dia bisa membela diri. Namun upaya RD untuk membela diri malah dipandang lain oleh Kepolisian Pekanbaru Kota. Dia malah ditetapkan sebagai Tersangka. Sebab upaya membela diri yang dilakukan malah menyebabkan nyawan ACS Alias IS melayang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbincangan mengenai masalah tersebut masih dipandang sangat penting dan aktual. dalam hal ini penulis akan menjelaskan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam agar pasal tersebut tetap berfungsi, karena sulit dalam pembuktiannya. Sehingga tidak terjadi kasus seperti halnya di Pekanbaru tersebut terutama dalam tindak pidana pemerkosaan. Persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam. Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai:

**”ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan Masalah Dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana islam terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui sistem pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam Hukum Pidana Islam

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap praktik pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam tindak pidana pemerkosaan.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan sebuah karya ilmiah yang memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis kaji, diantara telaah pustaka sebagai berikut :

1. Skripsi Karya Muhayati Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Walisongo (IAIN) Walisongo Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*,"<sup>4</sup> Penulis disini menyatakan bahwa menurut hukum islam, seseorang yang melakukan pembunuhan guna pembelaan tanpa ada cara lain diperbolehkan dan dalam Hukum Positif dikenal dengan Pembelaan Terpaksa (*Nodweer*) ketentuan dalam KUHP di Pasal 49 Ayat 1 sebagai alasan pembenar, sedangkan dalam ayat 2 dikenal dengan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dengan alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pidana.
2. Skripsi Karya Abd Gapar "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan karena kealpaan dalam pasal 359 KUHP*" Menerangkan bahwa karena adanya unsur kealpaan atau ketidaksengajaan dalam pembunuhan maka pelaku memperoleh peringanan saksi dari perbuatannya. Seperti dalam KUHP dari penjara maksimal 20 tahun (pembunuhan sengaja) kepada penjara maksimal 5 tahun atau kurungan 1 tahun (Pembunuhan karena kealpaan). Dan dalam hukum Islam, dari qisas } (pembunuhan sengaja atau berencana)

---

<sup>4</sup> Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2011.

kepada diyat atau memerdekakan budak (pembunuhan karena kealpaan).<sup>5</sup>

3. Skripsi Karya M. Eko Wahyudi (NIM: 2199184) tahun 2004 dengan judul: *Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut Imam Abu Zahrah seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan, pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya<sup>6</sup>
4. Skripsi Karya Dwi Ayuningtyas ( NIM : 132211103) Tahun 2018 dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Nodweer Excess) Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Dalam Skripsi ini lebih membahas secara umum yaitu upaya perlindungan terhadap jiwa,kehormatan maupun harta yang berupa pembelaan diri ketika diserang atau dirampas haknya.<sup>7</sup>

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan Skripsi Ini adalah lebih spesifik Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam tindak pidana pemerkosaan yang menimbulkan Meninggalnya salah satu pihak Sesuai dengan Putusan Nomor 09/Pid.B/2013/PTR Dengan harapan pembahasan ini akan menjadi lebih terarah dan berimbang.

---

<sup>5</sup> Abd. Gapar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP*”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>6</sup> M. EkoWahyudi (NIM: 2199184) tahun 2004 dengan judul: *Analisis Atas PemikiranMuhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*.

<sup>7</sup> Dwi Ayuningtyas ( NIM : 132211103) Tahun 2018 dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Nodweer Excess) Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*.



## E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian dalam skripsi ini adalah :

### **Manfaat Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini berguna dalam memahami mengenai sistem pembelaan yang melampaui batas (Noodweer Excess) dalam hukum pidana islam serta dalam tindak pidana pemerkosaan khususnya.

### **Manfaat Praktis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan khasanah keilmuan khususnya dibidang hukum pidana Islam.
- b. Diharapkan setelah Penelitian ini usai, bisa bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait.

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>8</sup>

Adapun Metode Penelitian disini meliputi beberapa hal yaitu Jenis Penelitian, Sumber Data Dan Analisis Data.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu *Normatif*, yaitu nama lainnya Penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

---

<sup>8</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 2

Metode Dokumentasi (*Documentation*) yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.<sup>9</sup> Kedudukan teknik dokumen dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan tehnik pengumpulan datanya. Ada pula sumber bukan manusia (*nonhuman resource*) diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>11</sup>

Antara lain:

### a. Data Primer

Merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama (langsung dari sumbernya) yang terkait dengan thema penting ini. Jadi, merupakan data pokok untuk mengumpulkan data kajian. Seperti: Buku *Fiqh Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, tesis dan peraturan perundang undangan atau data yang berasal dari orang kedua artinya data merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya seseorang. Seperti: Asas-Asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia oleh Moeljatno, Hukum Pidana Islam, karya Ahmad Wardi Muslih dan buku-buku lain yang relevan.

---

<sup>9</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.177

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.179

<sup>11</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke-4, 2000, hlm. 9

### 3. Analisis Data

Metode Analisis Data Adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang sudah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analisis) dengan pendekatan Induktif yang merupakan pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum,<sup>12</sup> metode ini penulis gunakan untuk menganalisis pasal 49 ayat 1 dan 2 tentang pembelaan terpaksa yang melebihi batas dan delik pembunuhan ditinjau dari hukum islam.

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini maka penulis akan paparkan sistematika penulisan skripsi.

**BAB I** ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan.

**BAB II** Membahas mengenai Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam Perkara Pidana Pemerkosaan A. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam Hukum Positif B. Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Hukum Pidana Islam C. Tindak Pidana Pemerkosaan

**BAB III** akan membahas mengenai Kronologi kasus Sesuai Putusan No 09/Pid.B/2013/PTR ,.

**BAB IV** Merupakan Bab Kajian analisis mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pemerkosaan dan Putusan No 09/Pid.B/2013/PTR A. Analisis Hukum mengenai Pembelaan

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi Revisi, Bandung: Remaja Roesda Karya, 2006, hlm.10

Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pemerkosaan sesuai Putusan No 09/Pid.B/2013/PTR, B. Analisis Hukum Islam mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Putusan No 09/Pid.B/2013/PTR.

**BAB V** Memuat Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.

## **BAB II**

### **PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCESS) DALAM PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN**

#### **A. PEMBELAAN TERPAKSA YAANG MELAMPAUI BATAS DALAM HUKUM POSITIF**

Pembelaan diri dalam hukum positif tentang hukum (Kedudukan) pembelaan diri mengalami berbagai perubahan. Pada masa dahulu pembelaan diri merupakan hak yang diambil dari hukum alami (dengan sendirinya), bukan dari hukum positif. Pada abad-abad pertengahan pembelaan diri tidak dianggap sebagai suatu keadaan yang menghindari hukuman, tetapi hanya memungkinkan untuk dibebaskan dari hukuman. Pada abad ke delapan belas, pembelaan dianggap sebagai keadaan terpaksa (darurat) yang memperbolehkan seseorang untuk membela dirinya dengan sendiri. Keadaan terpaksa tersebut timbul sebagai akibat tidak adanya perlindungan yang siap dari masyarakat (negara). Pada abad kesembilan belas pembelaan diri dianggap sebagai keadaan terpaksa, karena bahaya yang telah mengepung korban menyebabkan dia tidak mempunyai pilihan lain, dan karena nalurnya (gharizah) mendorong dia untuk memelihara hidupnya. Kelemahan pendirian ini ialah karena ia tidak dapat memberikan alasan tentang pembelaan terhadap diri orang lain dan harta benda.

Pendapat terbaru sekarang dalam hukum positif berpendirian bahwa pembelaan diri merupakan pemakaian hak yang diberikan oleh undang-undang, bahkan merupakan tugas kewajiban, karena menjadi hak bahkan menjadi kewajiban tiap-tiap orang untuk memelihara hidupnya serta mempertahankan diri atau harta bendanya, apabila masyarakat tidak mempunyai keuntungan dalam menjatuhkan hukumann atas orang yang membela diri, karena ia bukanlah pembuat yang dikhawatirkan kejahatannya. Dalam hal ini hukum positif sudah menyamai pendirian syariat Islam yang telah dikemukakan beberapa ratus tahun sebelumnya. Sarjana sarjana hukum positif berpendirian bahwa hak membela diri bisa dipakai terhadap orang gila atau anak kecil, meskipun kedua-duanya

dibebaskan dari hukuman. Karena pembelaan yang sah bukan merupakan hukuman yang harus dijatuhkan terhadap orang yang melakukan serangan, sebagai penyerang melainkan untuk menolak serangannya. Pendirian ini sama dengan pendirian kebanyakan *fuqaha*. Kemudian sarjana-sarjana hukum positif memperselisihkan tentang pembelaan terhadap serangan hewan, apakah dianggap sebagai pembelaan diri ataukah sebagai keadaan memaksa, sebagian sarjana-sarjana tersebut berpendapat seperti *fuqaha-fuqaha* mazhab hanafi bahwa hewan tidak dianggap sebagai penyerang atau pembuat jarimah, dan keadaan terpaksa itulah yang membolehkan pembunuhan hewan.<sup>1</sup>

Pembelaan Terpaksa (*Nodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) dan *noodweer-Excess* (Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

1. *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
2. *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan

---

<sup>1</sup> Ibid, hlm 216

<sup>2</sup> Pasal 49 KUHP

biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Jadi apabila seseorang itu oleh seseorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan di penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.<sup>3</sup> Memang syarat-syarat Noodweer pada isi Pasal 49 KUHP tidak cukup menjelaskan apa saja syarat-syarat Noodweer itu secara normatif maka dicarilah sumber hukum sebagai landasan atau pijakan kita untuk mengambil langkah-langkah hukum. Sumber hukum itu adalah doktrin dan yurisprudensi. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana syarat yang dipenuhi oleh serangan itu adalah :

1. Serangan itu bersifat melawan hukum

Menurut Prof.van H suatu serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami suatu penderitaan. Menurut sejarah, Noodweer itu biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai perbuatan.

Dengan adanya syarat yang mengatakan bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum maka timbul suatu pertanyaan apakah serangan seekor binatang termasuk bersifat melawan hukum? Menurut Prof Pompe suatu noodweer tidak dapat dilakukan terhadap suatu serangan yang datang dari seekor binatang, kecuali apabila binatang tersebut merupakan sebuah alat

---

<sup>3</sup> Soesilo R, (1983), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia

yang telah dipergunakan oleh seseorang yang telah melakukan suatu penyerangan. Pendapat dari Prof Pompe itu sesuai juga pendapat dari Hoge Raad yang dapat dijumpai di dalam arrest-arrestnya, masing-masing tanggal 11 Mei 1903, W. 7928 dan tanggal 27 Februari 1905, W.8186 yang antara lain telah mengatakan bahwa : “ serangan itu haruslah merupakan suatu tindakan melawan hukum yang secara langsung dilakukan oleh manusia, dan bukan merupakan serangan yang datang dari seekor binatang yang telah tidak dihasut oleh seorang manusia. Berkenaan dengan serangan yang datang dari seekor binatang seperti dimaksud di atas itu, perlu kita ketahui, bahwa Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 3 Mei 1915, N.J. 1915 halaman 813, W. 9820 yang juga dengan sebutan “politiehond-arrest” itu, telah menolak alasan yang telah dikemukakan oleh seseorang pemohon kasasi yang telah menembak mati seekor anjing pelacak yang telah dilepaskan oleh anggota polisi untuk mengejar dirinya, yakni segera setelah ia selesai melakukan suatu perampokan, bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan di dalam suatu Noodweer.Serangan itu Secara Langsung atau Seketika.

Untuk dapat disebut bersifat seketika pada umumnya bahwa serangan itu haruslah telah dimulai akan tetapi juga belum selesai. Artinya apabila serangan itu telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu noodweer. Akan tetapi noodweer itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir.

Menurut Prof Simons, selama seorang pencuri yang menguasai benda hasil curiannya itu masih berada dalam jangkauan dari pemilik benda tersebut, maka serangan itu dapat dipandang sebagai masih berlangsung. Dengan kata lain bahwa selama pencuri yang menguasai benda hasil curian itu masih berada dalam jangkauan dari orang yang barangnya telah dicuri, maka orang tersebut dapat melakukan suatu *noodweer* untuk memperoleh kembali barangnya. Oleh karena itu dengan selesainya kejahatan pencurian itu tidaklah berarti bahwa serangan yang



dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP itu juga harus dianggap telah berakhir.

Serangan yang dimaksud di sini harus ditujukan kepada bersifat berbahaya yang mengancam secara langsung bagi tubuh, kehormatan dan benda kepunyaan diri sendiri atau kepunyaan orang lain. Perkataan tubuh di sini adalah berkenaan dengan nyawa berikut masalah tidak terganggunya atau masalah kebebasan untuk bergerak.

Kehormatan yang dimaksud di sini bukanlah kehormatan dalam arti nama baik melainkan dalam arti seksual. Misalnya kehormatan seorang wanita yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki. Terhadap usaha laki-laki untuk memperkosa kehormatan seorang wanita semacam itu, kita dapat melakukan suatu *noodweer*.<sup>4</sup>

Menurut Andi Hamzah, Unsur unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah :

1. Pembelaan itu bersifat Terpaksa
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang di bela dan cara yang di pakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan . Jadi, harus proporsional.<sup>5</sup>

Menurut Pompe, Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa

---

<sup>4</sup> Lamintang P.A.F., (1990), Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru

<sup>5</sup> Andi Hamzah.1994. *Asas-Asas Hukum Pidana PT Rineka Cipta* : Jakarta. Hlm 167

juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda. Bergerak badan kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.

Dalam literatur Hukum Pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut *vis absoluta*. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain, jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Misalnya, seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain.

Orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain. Daya paksa absolut ini seperti tersebut di muka bersifat fisik, tetapi dapat juga bersifat psikis, misalnya orang yang hipnotis, sehingga melakukan delik. Di sini pun orang tersebut tidak dapat berbuat lain.

Di sini daya paksa itu datang dari luar. Mungkin pula dari alam. Misalnya pilot yang pesawatnya terhempas ke landasan karena gempa dan menimpa pula pesawat lain sehingga jatuh korban di pesawat lain itu.

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah<sup>6</sup>, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan

---

<sup>6</sup> Ibid Hal,159-160

jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.<sup>7</sup>

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

R.Sugandhi S.H., Terkait pasal 49 KUHP, Mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “ pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut :

- a. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
- b. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “Melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.<sup>8</sup>

Sedangkan mengenai *noodweer excels*, R,Sugandhi, S.H, Menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga, untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu”

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 168

<sup>8</sup> R.Sugandhi.1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional : Surabaya.

diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu, guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.<sup>9</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup *noodweer*, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal disekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap penyerang.<sup>10</sup>

### **Syarat dan Unsur *Noodweer***

1. Harus ada serangan (*aanranding*), harus memenuhi syarat:
  - a. Serangan itu Harus Datang Mengancam dengan Tiba-Tiba  
 Pembolehan pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara obyektif belum diwujudkan namun baru adanya ancaman serangan.<sup>11</sup>
  - b. Serangan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)  
 Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil)

---

<sup>9</sup> Ibid hal 59

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro.2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* . PR. Refika Aditama : Bandung

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum . . .*, 47.

2. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri<sup>12</sup> harus memenuhi syarat:
  - a. Harus merupakan pembelaan yang terpaksa  
 Benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada alternative perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Apabila seseorang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejar, maka disini ada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membelaan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam.
  - b. Pembelaan itu dengan serangan setimpal  
 Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam.
3. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksuil.
4. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti ada tiga syarat yaitu serangan seketika, ancaman serangan seketika itu dan bersifat melawan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 73-74.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: aksara Baru, 1987), 76.

5. Serangan yang dilakukan binatang, orang gila dan instrumen security keamanan.

### **Tidak mampu bertanggung jawab**

Hal ini umumnya dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku, antara lain :

- a. Jiwa si pelaku cacat
- b. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan
- c. Gangguan penyakit jiwa

Perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan pelaku yang demikian, ia pun di maafkan.<sup>14</sup>

## **B. PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam**

- a. Pengertian *dif'a asy-syar'i* (pembelaan syar'i khusus) atau *daf'u as-sailn* (menolak penyerang atau pembelaan diri)

Menurut istilah yang dimaksud *daf'u as-sail* (menolak penyerang/ pembelaan diri) yaitu kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia dalam mempertahankan hartanya atau harta orang lain terhadap kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.<sup>15</sup>

Para fuqaha sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak.

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm 72.

<sup>15</sup> Abdul Qadir 'Audah, *op. cit*, hlm. 138

Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.<sup>16</sup>

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib.<sup>17</sup>

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan hewan maka harus membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cara lain untuk membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh, dan tidak bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata sebab korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.<sup>18</sup> Imam Abu Hanifah serta muridnya kecuali Abu

---

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 211.

<sup>17</sup> Misalnya, jika ada seorang laki-laki hendak memperkosa wanita, sedang seorang wanita tidak sanggup menolaknya (membela diri) kecuali dengan jalan membunuh, wanita tersebut wajib membunuhnya jika dia sanggup. Demikian pula jika seorang lelaki (A) yang melihat lelaki lain (B) hendak menzinahi wanita, tetapi dia tidak sanggup mencegah perzinahan yang menimpa wanita itu kecuali dengan membunuh si B, maka si A wajib membunuh jika dia sanggup. Wajib adalah suatu hal dimana orang yang meninggalkannya akan tercela secara syara'. Lihat dalam Abul Qadir 'Audah, *op.cit*, hlm. 88.

<sup>18</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (HPI)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, Cet. ke-2, 1989, hlm.168.

Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang harus bertanggung jawab secara perdata yaitu dengan membayar diat atas anak-anak, orang gila dan harga binatang yang telah dibunuhnya. Alasannya adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana, padahal perbuatan anak-anak, orang gila dan hewan tidak dianggap sebagai tindak pidana karena binatang tidak berakal.

Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya bertanggung jawab atas harga hewan karena perbuatan anak kecil dan orang gila tetap dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun penjatuhan hukuman atas keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (kecakapan bertindak). Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa menolak serangan anak kecil dan orang gila adalah dalam keadaan membela diri sedangkan menolak serangan hewan merupakan keadaan darurat yang memaksa.<sup>19</sup> Alasan ulama yang mengatakan ditegakannya pembelaan diri dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan.<sup>20</sup>

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan

---

<sup>19</sup>Abdul Qadir ‘Audah, *op. cit*, hlm. 141, *dharurat* adalah situasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain pengertian tersebut mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Wahbah Zuhaili menilai pengertian-pengertian tersebut kurang lengkap, karena *dharurat* mencakup semua yang berakibat diboolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka ia menambahkan selain memelihara jiwa, *dharurat* juga memelihara akal, kehormatan dan memelihara harta. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-darurah al Syar’iyah ma’a al Qanun al-Wad’i*, Damaskus: Muassasah al Risalah, 1995, hlm. 65

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 213



tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang marjuh(lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang rajih (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib.

Menurut Dr. Mohammad M. Ismail dalam bukunya *al-Fikr al-Islami*, Allah telah menetapkan hukum-hukum *uqubat* (hukum pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai pencegah dan penebus. Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal; dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat.<sup>21</sup>

b. Syarat-syarat pembelaan

1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil

---

<sup>21</sup> Ibid

dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.<sup>23</sup>

Ulama yang mengatakan ditegakkannya pembelaan diri menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain, pengertian tersebut mengarah dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan.

## 2) Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan

---

<sup>22</sup> Abul Qadir 'Audah, *op. cit*, hlm. 479-480

<sup>23</sup> A. Wardi Mushlich, *op. cit*, hlm. 90

apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.<sup>24</sup> Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagaimana fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.<sup>25</sup> Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya<sup>26</sup> Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang sering mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>25</sup> Marsum, *op.cit*, hlm. 168-169.

<sup>26</sup> Ukuran kekuatan seperlunya memang relatif, dan itu didasarkan atas dugaan orang yang diserang disesuaikan dengan perkiraan yang benar-benar terjadi atau dengan perbuatan yang diniatkan oleh orang yang melakukan perbuatan. Jika penyerang tidak menggunakan senjata maka untuk penolakannya tidak perlu memakai senjata. Apabila orang yang diserang menggunakan kekuatan yang melebihi batas yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas kelebihan perbuatannya itu. Lihat dalam A. Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 91

dilakukan cara yang lebih berat.

Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya. Melewati batas ukuran pembelaan diri (yang dibolehkan), Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.

Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Contohnya, apabila seseorang bermaksud memukul si penyerang tetapi dia tersalah karena mengenai orang lain sehingga melukai atau bahkan membunuhnya, si pembela diri harus bertanggung jawab atas pelukaan atau pembunuhan tersalah tersebut meskipun bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Hal ini disamakan dengan berburu binatang tapi tersalah sehingga mengenai orang lain. Berburu itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pemburu tetap bertanggungjawab atas penembakan tersalah yang mengenai manusia tersebut.<sup>27</sup>

Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 152

berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup> Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.

## 2. Pembelaan umum (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut syara' dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan.<sup>28</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.<sup>29</sup>

Para fuqaha berpendapat bahwa pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pembelaan umum diadakan dengan tujuan agar masyarakat berdiri diatas

<sup>28</sup> Marsum, *op. cit.*, hlm. 169

<sup>29</sup> QS. Al Imran (3): 110

kebajikan dan pada individu-individu yang ada di masyarakat ditumbuhkan sifat keutamaan sehingga dengan demikian kapasitas jarimah dan penyelewengan akan menjadi berkurang. Akan tetapi, para fuqaha masih berbeda pendapat tentang ketentuan atau batas wajib tersebut dalam 2 hal yaitu sifat dari kewajiban tersebut, apakah *wajib ain* atau *wajib kifayah* dan tentang orang yang terkena kewajiban tersebut.

Menurut sebagian fuqaha adalah wajib ain yang dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajiban tersebut lebih kuat dari pada kewajiban haji, karena untuk kewajiban haji disyaratkan adanya kesanggupan (*istitha'ah*), sedangkan untuk pembelaan umum tidak disyaratkan kesanggupan.<sup>30</sup> Para fuqaha Yang berpendapat bahwa hukum pembelaan umum hukumnya wajib kifayah berdasarkan atas firman Allah QS AL Imran Ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>31</sup>

Jihad atau berperang diwajibkan atas setiap orang tetapi kewajiban menjadi tehapus jika sudah ada orang lain yang menjalankannya. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat (*waltakum minkum*) yang artinya adalah hendaklah ada diantara kamu, konotasinya adalah tidak menunjukan keseluruhan umat.<sup>32</sup>

Tentang orang yang diwajibkan melakukan pembelaan umum, menurut sebagian fuqaha adalah setiap orang. Tetapi menurut fuqaha lainnya yaitu hanya orang yang mempunyai kesanggupan seperti: pemuka

---

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm.219-230

<sup>31</sup> QS. Al Imran (3): 104

<sup>32</sup> Abdul Qadir 'Audah, *op. cit*, hlm. 494, lihat juga dalam Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 220 dan Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 95.

agama atau ulama', dengan alasan dikhawatirkan jika dibebankan kepada setiap orang, sedangkan orang tersebut tidak mengetahui tentang hukum Islam maka bisa terjadi keadaan sebaliknya yaitu melarang kebaikan dan memerintahkan keonaran.

a. Sumber dan hukum tindakan pembelaan umum

Ma'ruf atau kebaikan adalah setiap ucapan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip umum syari'at Islam, seperti berakhlak mulia, berbuat baik kepada fakir dan miskin dan sebagainya. Munkar adalah setiap perbuatan yang dilarang terjadinya menurut syari'at Islam.

Apabila sebuah umat (komunitas masyarakat) secara keseluruhan berdiam diri dari kewajiban khusus ini, *amar ma'ruf nahi munkar* maka kemungkaran akan tumbuh berkembang dan menjadi sesuatu yang alamiah dalam tubuh umat (masyarakat) tersebut. Hati nurani mereka pun tidak akan tersentuh lagi atas hilangnya kehormatan, keagungan, atau kemuliaan, tidak ada empati dan simpati, dekadensi moral, dan lunturnya persatuan sosial. Hal ini pada gilirannya akan menyeret pada kehancuran dan kebinasaan umattersebut dari segi sosial dan politik.<sup>33</sup>

Menyuruh kebaikan (*amar ma'ruf*) bisa berupa perkataan seperti ajakan untuk membeantu korban gempa atau dapat berupa perbuatan seperti pemberian contoh hal yang baik kepada orang lain. Bisa juga gabungan antara perbuatan dan ucapan seperti mengajak untuk mengeluarkan zakat sekaligus mengeluarkannya. Sedangkan melarang kemungkaran (*nahi munkar*) bisa berupa perkataan seperti melarang orang lain minum minuman keras. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurkan untuk mengerjakan atau mengucpkan apa yang seharusnya. Sedangkan melarang keburukan adalah membujuk orang lain agar meninggalkan apa yang sebaiknya

---

<sup>33</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 252-253

ditinggalkan.<sup>34</sup>

b. Syarat-syarat pembelaan umum

Hukum pembelaan umum adalah wajib, tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan orang yang melaksanakannya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan tabiat (sifat) kewajiban dan ada pula yang berkaitan dengan prinsip dasar syariat.

- 1) Dewasa dan berakal sehat (*mukalaf*)
- 2) Beriman
- 3) Adanya kesanggupan
- 4) Adil
- 5) Izin (persetujuan)<sup>35</sup>

c. Syarat melarang keburukan

Untuk melaksanakan amar ma'ruf tidak diperlukan syarat khusus, karena amar ma'ruf berupa nasihat, petunjuk dan pengajaran. Jadi, bisa dilakukan setiap saat dan kesempatan. Adapaun untuk mencegah kemungkaran maka diperlukan syarat tertentu, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan buruk atau munkar
- 2) Keburukan atau kemunkaran terjadi seketika
- 3) Kemunkaran itu diketahui dengan jelas Dalam firman Allah SWT

dijelaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Pemberantasan kemungkaran harus dengan cara seringan mungkin.”<sup>36</sup>

<sup>34</sup> A. Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 95

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 220-221

<sup>36</sup> QS. Al Hujurat (49): 12



d. Cara memberantas kemungkaran

Apabila seseorang melakukan keburukan (kemungkaran) sedang ia tidak tahu perbuatannya adalah keburukan, cara yang baik untuk mencegahnya adalah dengan memberi penjelasan dengan sikap yang halus dan lemah lembut bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang buruk.

- 1) Penjelasan Jika seseorang melakukan suatu perbuatan mungkar tetapi dia tidak tahu bahwa perbuatannya adalah keburukan, maka cara yang baik untuk mencegahnya adalah memberi penjelasan kepadanya bahwa perbuatannya adalah suatu perbuatan mungkar

- 2) Memberi nasihat dan petunjuk

Ditunjukkan kepada orang yang memulai suatu perbuatan dan menyadarinya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan munkar. Jika dengan nasihat dan petunjuk bisa diduga pelaku perbuatan tersebut akan meninggalkan kemungkaran tersebut.

- 3) Menggunakan kekerasan

- a. Hanya dalam keadaan darurat dan orang yang melakukan perbuatan tidak dapat diatasi dengan cara halus.

- b. Orang yang menggunakan kekerasan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar, melainkan dengan kata-kata yang baik, benar, sopan serta sesuai dengan kebutuhan.<sup>37</sup>

- 4) Mengadakan tindakan dengan tangan

Cara ini hanya berlaku pada perbuatan maksiat yang menurut tabiatnya dapat mengalami perubahan materiil dan tiak berlaku pada maksiat yang berkaitan dengan lisan dan hati.

Ada 2 syarat yang diperlukan:

- a. Orang yang melakukan pemberantasan tidak perlu menggunakan tangannya sendiri, selama pelaku dapat dan bersedia mengubahnya sendiri.

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir 'Audah, *op. cit*, hlm. 506.

b. Tindakan dengan tangan harus disesuaikan dengan kadarnya.<sup>38</sup>

5) Menggunakan ancaman pemukulan dan pembunuhan

Cara ini baru tahap ancaman, bukan tindakan. Ancman tersebut harus merupakan ancaman yang bisa diwujudkan, bukan ancaman yang tidak boleh diwujudkan. Misalnya, nanti kamu saya dera atau saya pukuli dengan perkataan yang lebih keras.

6) Menggunakan pemukulan dan pembunuhan

Cara ini boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan digunakan secara bertahap sesuai dengan keperluan. Pembunuhan hanya boleh digunakan apabila sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memberantas perbuatan maksiat yang terjadi.

7) Minta bantuan orang lain

Apabila dengan dirinya sendiri seseorang tidak mampu untuk memberantas kemungkaran dan memerlukan bantuan orang lain dengan kekuatan dan senjatanya maka para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat meminta bantuan orang lain untuk memberantas kemungkaran tidak diperbolehkan karan cara tersebut dikhawatirkan bertambah luasnya keributan dan ketidaktentraman sebab orang yang diberantas juga akan mendatangkan temannya sehingga dapat menimbulkan peperangan. Perorangan boleh menggunakan cara ini jika mendapat izin dari penguasa.

Menurut sebagian fuqaha lainnya, cara tersebut boleh digunakan tanpa memerlukan izin dari penguasa sebab cara tersebut pada hakikatnya sama dengan cara lain yang menimbulkan kemungkinan terjadinya keributan yang lebih luas. Ketujuh cara tersebut dapat digunakan terhadap siapa saja, kecuali terhadap orang tua, suami dan pihak penguasa. Dalam firman Allah SWT.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> A. Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 98-100

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 101

### C. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.

Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena :

- a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama
- b. Membuat perempuan sakit
- c. Melanggar hak asasi manusia

Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya.<sup>40</sup> Menurut Muladi pengertian tindak pidana perkosaan pada Pasal 423 RKUHP tidak hanya berkaitan dengan perkosaan dengan kekerasan (*violence rape*), tetapi juga mencakup persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan; tanpa persetujuan; karena penipuan; atau karena hukum (*statutory rape*) wanita masih dibawah umur 14 tahun; atau karena pincan atau tidak berdaya; demikian pula apabila kondisi tersebut dilakukan dengan “oral” atau “anal”, atau dengan menggunakan “benda yang bukan anggota tubuhnya (*artificial organ*)”.<sup>41</sup>

Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus

---

<sup>40</sup> Santoso, Topo. 1977. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind Hill Co. Jakarta.hlm 19

<sup>41</sup> Mulyadi, RKUHP. 2004: 75

melalui vagina tetapi pula dimasukkan anus. Dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, jadi perkosaan berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak wanita. Walaupun tidak melawan kalau hubungan seks itu dipaksakan berarti perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perkosaan oleh orang tak dikenal (*stranger rape*)
- b. Perkosaan orang teman kencan atau pacar (*date rape*)
- c. Perkosaan oleh orang yang dikenal (*acquaintance rape*)
- d. Perkosaan oleh pasangan perkawinan (*marital rape*)
- e. Pelecehan seksual (*sexual harassment*)
- f. Perkosaan oleh atasan di tempat kerja (*office rape*)
- g. Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (*incest*).<sup>42</sup>

Pengertian perkosaan secara Yuridis menurut Pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.<sup>43</sup>

Ketika disimak ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu adanya persetubuhan, persetubuhan itu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP.

---

<sup>42</sup> Jurnal Perempuan Edisi 50, Mei 2007

<sup>43</sup> Santoso, Topo. 1977. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind Hill Co. Jakarta.

Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka, sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan, sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan perkosaan. Di bawah ini beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan antara lain :

- a. Pasal 286: “Barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- b. Pasal 287 ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawainkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- c. Pasal 287 ayat (2): “Penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut dalam pasal 291”.
- d. Pasal 291 ayat (1): “Bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal 286, 287....mengakibatkan luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- e. Pasal 291 ayat (2): “Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam pasal 285, 286, 287....mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

#### **1. Pengertian pemerkosaan berdasarkan Pasal 381 RUU KUHP**

- a. Seorang laki-laki dengan perempuan bersetubuh, bertentangan dengan kehendaknya, tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman atau percaya Ia suaminya atau wanita dibawah 14 tahun dianggap perkosaan.
- b. Dalam keadaan ayat (1), memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 381 RUU KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis,
- b) Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya.
- c) Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun.
- d) Unsur persetubuhan, persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.
- e) Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya melakukan persetubuhan tanpa ada kerelaan dari si isteri, maka dapat digolongkan termasuk perkosaan.

## **2. Pengertian Korban Perkosaan**

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah:

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.<sup>44</sup>

Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.<sup>45</sup>

Agus Purwadianto berpendapat bahwa perkosaan merupakan istilah hukum, sehingga bila didefinisikan perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seseorang wanita di luar

---

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

<sup>45</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 1997: 25

pernikahan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>46</sup>

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa.<sup>47</sup>

Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara lain :

a. Pola Korban Perkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk

---

<sup>46</sup> Purwadianto, Agus. 1981. *Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. Jakarta.

<sup>47</sup> Ensiklopedia Indonesia. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta 1984: 2674

mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konsultual positif.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban. Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu- waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.



b. Ciri-ciri Korban Perkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

1. Lemah mental

Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.

2. Dihingapi rasa takut untuk melawan. Lemah fisik

- a) Kurang mampu melawan karena tubuhnya
- b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri
- c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri
- d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

3. Lemah sosial

- a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1. Korban murni

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena

sudah cacat khusus dan lain-lain.

#### Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.

#### 3. Korban yang tidak nampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU NOMOR 09/Pid.B/2013/PTR**

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 09/Pid.B/2013/PTR dalam hal ini mempunyai duduk perkara sebagai berikut :

Dalam Perkara ini Terdakwa atas nama Ratna Dewi Binti Muhammad Sima Alias Ratna Lahir di Lhokseumawe, 09 Januari 1977 (35 Tahun) yang beralamat di Kav.Kamboja Blok U2 No.23 Kec. Sagulung Kota Batam Beragama Islam, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, Berpendidikan terakhir SD kelas III dan Korban atas nama Adi Charlie Siregar.

Tentang Duduk Perkara

Bahwa terdakwa Ratna Dewi Muhammad Binti Muhammad Sima, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan raya tikungan Setokok Jembatan III Barelang Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, terdakwa yang sedang berada di Tanjung Pinang dan sedang mencari suaminya yang tidak ada kabarnya karena sudah tidak pulang ke rumah, mencoba menelepon teman suaminya di HP milik terdakwa dan melihat ada nama Joko lalu terdakwa menelepon nama Joko tersebut dan diangkat oleh lelaki yang bernama Rudi Arman Purba (pemilik HP), yang kemudian mengaku sebagai Joko setelah ditanya oleh terdakwa apakah yang mengangkat telepon tersebut adalah Joko, teman dari mas Heri (suami terdakwa) atau bukan. Oleh karena signal telepon kurang bagus, hubungan telepon tersebut terputus. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 21.10 Wib, terdakwa yang sedang berada di daerah Puskopar Batu Aji Kota Batam, memencet nomor yang terhubung lagi dengan nomor HP atas

nama Joko. Setelah telepon tersebut tersambung, ternyata yang mengangkat adalah teman Rudi Arman Purba (pemilik HP) yang bernama ADI CHARLI SIREGAR Als IPAN SIREGAR (selanjutnya disebut korban) dan oleh Rudi Arman Purba diminta agar pembicaraan tersebut *dispeaker*. Korban yang setelah ditanya di mana Joko kemudian menjawab bahwa Joko sudah tidur.

Kemudian terjadi percakapan antara Korban dan Terdakwa di telepon yang didengar oleh Rudi Arman Purba yang mana percakapan tersebut lebih kurang berisi tentang hal sebagai berikut :

- Korban : Ini temannya Joko. Coba bangunin Joko..  
 Terdakwa : Kita aja Dek yang ngobrol.. Mau ngapain ?  
 Korban : Bisa gak kita ketemuan sekarang ?  
 Terdakwa : Kamu jangan macam-macam, aku sudah punya suami.  
 Kamu ngapain ngajak jumpa ?  
 Korban : Aku ngajak makan aja..  
 Terdakwa : Aku ini cewek baik-baik..  
 Korban : Aku pun cowok baik-baik..  
 Terdakwa : Jadi kau mau ajak jumpa ?  
 Korban : Iya sekarang ..

Selanjutnya korban meminta nomor HP milik terdakwa dari Rudi Arman Purba lalu sekitar pukul 23.00 Wib korban meminjam sepeda motor milik Veri Damanik untuk berjumpa dengan terdakwa di simpang Hutatap. Sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa bertemu dengan korban disimpang Hutatap, lalu terdakwa naik ke motor korban sementara motor terdakwa disimpan dan diparkir di sebuah pangkalan ojek yang tidak ada lagi siapa-siapa di sana. Korban lalu mengajak terdakwa makan namun terdakwa menolak karena sudah makan kemudian mereka pergi untuk mencari suami terdakwa yang keberadaannya pun tidak diketahui oleh terdakwa. Korban pun perjalanannya ke arah Jembatan I Barelang dan ketika melewati Jembatan I Barelang, terdakwa melihat suaminya di antara orang-orang yang berpasangan dan berpacaran di tempat tersebut dan menyuruh korban berhenti lalu korban memutar balik arah motor dari

ujung jembatan I Barelang untuk menuju tempat suami terdakwa berdiri, namun di sana sudah tidak ada lagi suami terdakwa.

Kemudian korban memutar lagi arah motornya untuk menuju Jembatan II Barelang dan berhenti membeli satu kaleng Bir di sebuah warung di sekitar Jembatan II tersebut. Terdakwa meminta korban untuk mengejar suaminya, namun korban pergi bersama terdakwa menuju Jembatan III Barelang dan mengarahkan motornya ke arah semak-semak lalu terdakwa turun dari motor dan berdiri di pinggir jalan aspal dengan jarak antara terdakwa dan korban sekitar 5 meter. Terdakwa lalu menanyakan maksud korban namun Korban tidak menjawab dan hanya meminum Birnya hingga habis. Waktu pada saat itu menunjukkan sekitar pukul 00.45 Wib namun lampu jalan cukup baik menerangi terdakwa dan korban dan sepanjang jalan di sekitarnya. Korban kemudian pergi kencing, setelah itu meminta terdakwa untuk menelepon Joko namun terdakwa menolak. Korban lalu pergi ke arah terdakwa namun terdakwa lari dan disusul oleh korban lalu korban mendekati dan ingin memeluk terdakwa. Oleh karena dipeluk, terdakwa lalu mengingat bahwa ia membawa dan menyimpan satu buah pisau di dalam tasnya. Kemudian pisau itu dikeluarkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menusuk korban dengan pisaunya pada dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa lari sambil memegang pisau tersebut. Tidak lama berlari, seorang pengendara sepeda motor melintasi jalan dan terdakwa berusaha memberhentikan motor tersebut namun pengendara motor tidak berhenti dan mengatakan kalau di belakangnya akan ada mobil yang akan lewat.

Tidak lama kemudian, terdakwa membuang pisaunya ke arah semak-semak dan sebuah mobil lori pun datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa diberi tumpangan dan dibawa oleh pengendara lori tersebut ke Kantor Polsek Sagulung. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menusuk korban dengan pisau di bagian dada korban sebanyak satu kali tusukan, korban mengeluarkan darah dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor :

R/04/VeR/V/2012/Pusdokkes perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an.ADI CHARLI SIREGAR Als IPAN SIREGAR.

Yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar**

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia dua puluh tiga tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin).
2. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur.
3. Ditemukan lebam mayat di daerah punggung, tidak ditemukan kaku mayat dan tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
4. Kepala :
  - a. Bentuk : bulat lonjong, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - b. Rambut : berwarna hitam, lurus, panjang rata-rata lima sentimeter.
  - c. Mata kanan dan kiri : selaput bening mata keruh, selaput lendir mata pucat.
  - d. Hidung : Bentuk simetris, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - e. Mulut : bibir berwarna kecoklatan, selaput lendir mulut pucat, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, gigi geligi simetris, lidah berwarna kehitaman.
  - f. Telinga : bentuk simetris, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - g. Dahi : simetris, didapatkan luka lecet di dahi kanan sepanjang dua kali satu sentimeter.
  - h. Pipi kanan dan kiri : simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - i. Daguk : terdapat rambut sepanjang panjang rata-rata lima sentimeter.

- j. Mata kanan dan kiri : selaput bening mata keruh, selaput lendir mata pucat. rata-rata tujuh sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Leher : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada : simetris, didapatkan luka terbuka sepanjang tujuh sentimeter dengan satu sudut luka tajam dan satu sudut lainnya tumpul, dengan pinggir luka tajam, tidak ada jembatan jaringan. Luka terdapat sepuluh sentimeter di bawah puting susu dada kiri.
7. Perut : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Punggung : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda.
9. Pantat : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Anggota gerak bawah : jari-jari kaki berwarna pucat keunguan.
12. Alat kelamin luar : dikhitan, tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

### **Pemeriksaan Dalam**

1. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter. Otot-otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima milimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kiri terdapat perdarahan sebanyak seribu mililiter dan terdapat luka terbuka sepanjang lima sentimeter pada antara sela iga keenam dan ketujuh yang terus menembus kantong

jantung dan jantung sebelah kanan.

2. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah ; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah.
3. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong.
4. Lidah berwarna abu-abu pucat. Penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna merah perabaan kenyal, penampang merah, kelenjar kacang tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu-abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan sembilan sentimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimeter, tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri sebelas milimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen), terdapat luka terbuka sepanjang tiga kali satu sentimeter pada jantung sebelah kanan bawah (ventrikel kanan).
6. Paru kanan tiga bagian, berwarna abu-abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijitan keluar darah dan busa. Paru kiri dua bagian, berwarna abu-abu coklat kehitaman, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru-paru kiri hancur. Pada daerah antar bagian kedua paru terdapat bintik perdarahan.
7. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas.
8. Hati berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas.
9. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lendir tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersumbat. Kelenjar liur perut berwarna cokelat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna cokelat, gambaran kelenjar



jelas.

10. Kelenjar liur perut berwarna cokelat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna cokelat, gambaran kelenjar jelas.
11. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah.
12. Ginjal kanan simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
13. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan.

#### **Rongga Kepala :**

1. Jaringan bawah kulit : tebal nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Otot-otot kepala : warna merah.
3. Tengkorak : atap dan dasar tengkorak utuh, tidak didapatkan kelainan.
4. Otak : Selaput otak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Otak besar : berat seribu dua ratus Sembilan puluh gram tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Otak kecil : berat seratus sembilan puluh gram, tidak didapatkan kelainan.

### **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada dada kiri sepanjang tujuh sentimeter dengan satu sudut luka tajam dan satu sudut lainnya tumpul, dengan pinggir luka tajam, tidak ada jembatan jaringan. Luka terdapat sepuluh sentimeter di bawah puting susu dada kiri.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tersebut di atas menembus sela iga kemudian pembungkus jantung sampai menembus jantung kanan bagian bawah terdapat pendarahan pada rongga dada kiri yang luas.

Sebab kematian korban adalah kerusakan organ jantung yang menyebabkan perdarahan luas di rongga dada akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 495/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 28 Nopember 2012 sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap RATNA DEWI BINTI MUHAMMAD SIMA ALS. RATNA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2013 oleh kami : Hj. Wagiah Astuti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dahlia Brahmana, SH.,MH dan Abdul Fattah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/PID.B/ 2012/PTR tanggal 20 Pebruari 2012, putusan tersebut diucapkan pada hari dan Kamis tanggal 7 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M.F. Eva J.S,SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS**  
**(*Noodweer Excess*) DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN)**  
**PUTUSAN NOMOR 09/Pid.B/2013/PTR**

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 09/Pid.B/2013/PTR dalam hal ini mempunyai duduk perkara sebagai berikut :

Dalam Perkara ini Terdakwa atas nama Ratna Dewi Binti Muhammad Sima Alias Ratna Lahir Di Lhokseumawe, 09 Januari 1977 (35 Tahun) yang beralamat di Kav.Kamboja Blok U2 No.23 Kec. Sagulung Kota Batam Beragama Islam, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, Berpendidikan terakhir SD kelas III dan Korban atas nama Adi Charlie Siregar.

**A. Analisis Hukum mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pemerkosaan sesuai Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR**

Keadilan dalam menyelesaikan suatu kasus memang butuh sikap bijak serta kejelian dalam menangani kasus tersebut, apalagi dalam hal salah satu pihak sedang mengalami perasaan tertekan atau guncangan jiwa sehingga perbuatan tersebut terpaksa untuk dilakukan guna melindungi dirinya sendiri.

Dalam hal ini penulis menyoroti pada kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 09/Pid.B/2013/PTR Yaitu mengenai unsur Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam kasus tersebut Ratna Dewi Binti Muhammad Sima, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan raya tikungan Setokok Jembatan III Barelang Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, terdakwa yang sedang berada di Tanjung Pinang dan sedang mencari suaminya yang tidak ada kabarnya karena sudah tidak pulang ke rumah, mencoba menelepon teman suaminya di HP milik terdakwa dan melihat ada nama Joko lalu terdakwa menelepon nama Joko tersebut dan diangkat oleh lelaki yang bernama Rudi Arman Purba (pemilik HP), yang kemudian mengaku sebagai Joko setelah ditanya oleh terdakwa apakah yang mengangkat telepon tersebut adalah Joko, teman dari mas Heri (suami terdakwa) atau bukan. Oleh karena signal telepon kurang bagus, hubungan telepon tersebut terputus. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 21.10 Wib, terdakwa yang sedang berada di daerah Puskopar Batu Aji Kota Batam, memencet nomor yang terhubung lagi dengan nomor HP atas nama Joko. Setelah telepon tersebut tersambung, ternyata yang mengangkat adalah teman Rudi Arman Purba (pemilik HP) yang bernama Adi Charlie Siregar Als Ipan Siregar (selanjutnya disebut korban) dan oleh Rudi Arman Purba diminta agar pembicaraan tersebut *dispeaker*. Korban yang setelah ditanya di mana Joko kemudian menjawab bahwa Joko sudah tidur.

Selanjutnya korban meminta nomor HP milik terdakwa dari Rudi Arman Purba lalu sekitar pukul 23.00 Wib korban meminjam sepeda motor milik Veri Damanik untuk berjumpa dengan terdakwa di simpang Hutatap. Sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa bertemu dengan korban disimpang Hutatap, lalu terdakwa naik ke motor korban sementara motor terdakwa disimpan dan diparkir di sebuah pangkalan ojek yang tidak ada lagi siapa-siapa di sana. Korban lalu mengajak terdakwa makan namun terdakwa menolak karena sudah makan kemudian mereka pergi untuk mencari suami terdakwa yang keberadaannya pun tidak diketahui oleh terdakwa. Korban pun perjalanannya ke arah Jembatan I Barelang dan ketika melewati Jembatan I Barelang, terdakwa melihat suaminya di antara orang-orang yang berpasangan dan berpacaran di tempat tersebut dan

menyuruh korban berhenti lalu korban memutar balik arah motor dari ujung jembatan I Bareleng untuk menuju tempat suami terdakwa berdiri, namun di sana sudah tidak ada lagi suami terdakwa. Kemudian korban memutar lagi arah motornya untuk menuju Jembatan II Bareleng dan berhenti membeli satu kaleng Bir di sebuah warung di sekitar Jembatan II tersebut. Terdakwa meminta korban untuk mengejar suaminya, namun korban pergi bersama terdakwa menuju Jembatan III Bareleng dan mengarahkan motornya ke arah semak-semak lalu terdakwa turun dari motor dan berdiri di pinggir jalan aspal dengan jarak antara terdakwa dan korban sekitar 5 meter. Terdakwa lalu menanyakan maksud korban namun Korban tidak menjawab dan hanya meminum Birnya hingga habis. Waktu pada saat itu menunjukkan sekitar pukul 00.45 Wib namun lampu jalan cukup baik menerangi terdakwa dan korban dan sepanjang jalan di sekitarnya. Korban kemudian pergi kencing, setelah itu meminta terdakwa untuk menelepon Joko namun terdakwa menolak. Korban lalu pergi ke arah terdakwa namun terdakwa lari dan disusul oleh korban lalu korban mendekati dan ingin memeluk terdakwa. Oleh karena dipeluk, terdakwa lalu mengingat bahwa ia membawa dan menyimpan satu buah pisau di dalam tasnya. Kemudian pisau itu dikeluarkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menusuk korban dengan pisaunya pada dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa lari sambil memegang pisau tersebut.

Dari pemaparan kasus tersebut sesuai Putusan Nomor 09/Pid.B/2013/PTR maka ada unsur *Noodweer Excess*, Jika dilihat dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) dan *Noodweer Excess* (Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

- 1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau*

*ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*

- 2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*<sup>1</sup>

Terkait pasal 49 KUHP, Mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “ pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “Melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.<sup>2</sup> Sedangkan mengenai noodweer exces, R,Sugandhi, S.H, Menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga, untuk dapat dikategorikan “melampaui

---

<sup>1</sup> Pasal 49 KUHP

<sup>2</sup> R.Sugandhi.1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional : Surabaya.

batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu, guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.<sup>3</sup>

Perkara tersebut menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dikarenakan pelaku dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban, namun menurut hemat penulis kasus tersebut adalah kasus pemerkosaan dan terdakwa melakukan pembelaan diri terhadap tindakan asusila yang dilakukan korban, pernyataan tersebut diperkuat dengan Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis,

- a. Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya.
- b. Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun.
- c. Unsur persetubuhan, persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.
- d. Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya melakukan persetubuhan tanpa ada kerelaan dari si isteri, maka dapat digolongkan termasuk perkosaan.

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah :

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid hal 59

<sup>4</sup> Depdikbud,1990: 525, 757



Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pernyataan diatas maka unsur *noodweer excess* serta tindakan perkosaan sudah terpenuhi, sehingga terdakwa tidak seharusnya di jatuhi hukuman sesuai putusan.

**B. Analisis Hukum Islam mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pemerkosaan sesuai Putusan No 09/Pid.B/2013/PTR,**

Dalam Nash Al Quran dan pendapat berbagai ulama terhadap pembelaan terpaksa ada beberapa yang berbeda seperti :

QS AL BAQARAH AYAT 194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya : " Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut hanya menerangkan tentang penganjuran menyerang balik ketika diserang tetapi tidak menjelaskan syarat dan sanksi bagi penyerang jika melebihi batas serangan. Begitu juga dalam pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan dalam melakukan suatu pembelaan.

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 1997: 25

<sup>6</sup> QS Al Baqarah Ayat 194

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan hewan maka harus membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cara lain untuk membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh, dan tidak bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata sebab korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.<sup>7</sup> Imam Abu Hanifah serta muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang harus bertanggung jawab secara perdata yaitu dengan membayar diat atas anak-anak, orang gila dan harga binatang yang telah dibunuhnya. Alasannya adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana, padahal perbuatan anak-anak, orang gila dan hewan tidak dianggap sebagai tindak pidana karena binatang tidak berakal. Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya bertanggung jawab atas harga hewan karena perbuatan anak kecil dan orang gila tetap dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun penjatuhan hukuman atas keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (kecakapan bertindak). Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa menolak serangan anak kecil dan orang gila adalah dalam keadaan membela diri sedangkan menolak serangan hewan merupakan keadaan darurat yang memaksa.<sup>8</sup> Alasan ulama yang mengatakan ditegakannya pembelaan diri dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan pada harta, baik bersifat pidana atau bukan<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Marsum, *Jinayat (HPI)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, Cet. ke-2, 1989, hlm.168.

<sup>8</sup>Abul Qadir 'Audah, *op. cit*, hlm. 141, *dharurat* adalah situasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain pengertian tersebut mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Wahbah Zuhaili menilai pengertian-pengertian tersebut kurang lengkap, karena *dharurat* mencakup semua yang berakibat diboolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka ia menambahkan selain memelihara jiwa, *dharurat* juga memelihara akal, kehormatan dan memelihara harta. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, Damaskus: Muassasah al Risalah, 1995, hlm. 65

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 213

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian mengenai Studi analisis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam perkara tindak pidana pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR) Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu :

1. Dalam hukum islam beberapa fuqaha berpendapat penganjutan menyerang balik ketika diserang tetapi tidak menjelaskan syarat dan sanksi bagi penyerang jika melebihi batas serangan, Alasan ulama yang mengatakan ditegakkannya pembelaan diri dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan. sehingga secara otomatis perbuatan terdakwa dibenarkan dalam ajaran islam.
2. Tindakan terdakwa digolongkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dan memenuhi unsur unsur *Noodweer Excess* sehingga menurut hemat penulis terdakwa harusnya terbebas dari hukuman yang dijatuhkan

#### **B. SARAN-SARAN**

Adapun Saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya:

1. Untuk pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Peradilan harus mengutamakan unsur unsur kemanusiaan dalam setiap kasus yang di adili.
2. Untuk Para Penegak Hukum agar lebih memahami Hukum islam sehingga mampu menimbang suatu kasus secara komprehensif dan Seimbang.

### **C. PENUTUP**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang telah penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian setelahnya. Atas saran dan kritik konstruktif yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Gapar, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Al Quran*

Andi Hamzah.1994. *Asas-Asas Hukum Pidana PT Rineka Cipta* : Jakarta

Audah Abdul Qadir t.th, *Al Tasyri’ al jinai al islami*, kairo : dasar al turas

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta..

Dwi Ayuningtyas ( NIM : 132211103) Tahun 2018 dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Nodweer Excess) Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Ensiklopedia Indonesia. Ihtiar Baru Van Hoeve. Jakarta 1984: 2674

Hanafi Ahmad 1876, *Asas Asas hukum pidana islam*, jakarta : bulan bintang

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara,

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke-4, 2000,

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 2

Jurnal Perempuan Edisi 50, Mei 2007

Lamintang P.A.F., (1990), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar

Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi Revisi, Bandung: Remaja Roesda Karya, 2006,

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*

Marsum, *Jinayat (HPI)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, Cet. ke-2, 1989

Muhayati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2011

Mulyadi, RKUHP. 2004: 75.

Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 252-253

Purwadianto, Agus. 1981. *Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. Jakarta

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: aksara Baru, 1987),

R.Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional : Surabaya.

Santoso, Topo. 1977. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind Hill Co. Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1997: 25

Wahbah al-Zuhailly, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, Damaskus: Muassasah al Risalah, 1995,

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* . PR. Refika Aditama : Bandung

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus sidid

Tempat / Tanggal Lahir :Kendal , 04 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Alamat : Damarsari, Rt 05/01  
Kec.Cepiring Kab.Kendal

Nomor Telepon : 081901353015

Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Damarsari
- MTs NU 01 Cepiring
- SMK Bina Utama Kendal

Data Orang Tua

Nama Ayah : Supari

Tempat / Tanggal Lahir : Kendal, 10 januari 1964

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Alamat : Damarsari, Rt 05/01  
Kec.Cepiring Kab.Kendal

Nama Ibu : Siti Muadah

Tempat / Tanggal Lahir : Kendal, 15 maret 1963

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Damarsari, Rt 05/01 kec.Cepiring Kab.Kendal